

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI (RTLH) OLEH DINAS SOSIAL DI KELURAHAN
AIE PACAH KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara
FIS UNP Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

Nada Kamilia
TM/NIM : 2012/1205862

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Oleh Dinas Sosial Di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Nama : Nada Kamilia

NIM/TM : 1205862 / 2012

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 08 Februari 2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
NIP. 19630401 198903 1 003

Pembimbing II



Nora Eka Putri, S.IP, M.Si
NIP. 19850312 200812 2 006

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

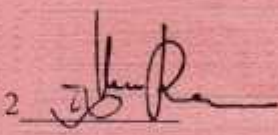
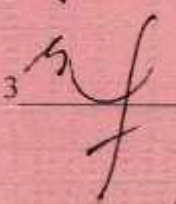
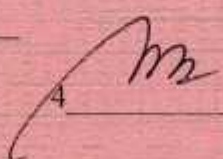
Pada Hari Kamis, Tanggal 07 Februari 2019 Pukul 09.00-10.00 WIB

**“Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Oleh Dinas Sosial Di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah
Kota Padang”**

Nama : Nada Kamilia
Nim/TM : 1205862 / 2012
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 08 Februari 2019

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	1 
Sekretaris	: Nora Eka Putri, S.IP, M.Si	2 
Anggota	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D	3 
Anggota	: Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D	4 

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nada Kamilia

NIM / TM : 1205862 / 2012

Tempat / Tanggal lahir : Padang, 23 Maret 1994

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Sosial di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang" adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 08 Februari 2019
Yang Membuat Pernyataan



Nada Kamilia
1205862 / 2012

ABSTRAK

NADA KAMILIA 1205862/2012 : Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Oleh Dinas Sosial Di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai masih terkendalanya pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Ada 3 (tiga) tujuan dalam penelitian ini, yaitu : (1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. (2) untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dari program bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. (3) untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam memaksimalkan pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Jenis penelitian ini dengan kualitatif metode deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Padang, di Kelurahan Aie Pacah. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi (pengamatan) dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang dianalisis diperoleh dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan selama penelitian dilakukan kemudian dilakukan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang sudah diupayakan secara optimal oleh penerima bantuan maupun instansi-instansi pemerintahan terkait namun dari proses pelaksanaannya masih adanya masalah yang timbul. (2) kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang diantaranya terkait dengan faktor terbatasnya dana yang diberikan dan kurangnya sumber daya yang diberikan. (3) adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan mengupayakan meminimalisir kendala yang ada agar keberhasilan suatu program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Dari hasil penelitian ini penulis juga memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang diantaranya meningkatkan koordinasi dan kerjasama dari seluruh elemen yang ada harus ikut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi agar bisa menjamin kesejahteraan masyarakat kedepannya.

Kata Kunci : Implementasi program, Perumahan.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warrahmatullahiwabarrakatu

Puji syukur kehadirat Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Oleh Dinas Sosial Di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”**. Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Nora Eka Putri, S.IP. M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D, Bapak Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D dan Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibuk Dosen pengajar beserta staf pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
6. Teristimewa kepada kedua orang tuaku dan keluarga yang telah memberikan do'a dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku yang shalihah yaitu Daratul Azizah, Desi Ratna Sari, Fitri Yulianti, Sisila Dora dan Nadya Rizky Vyara yang selalu memberikan semangat, motivasi dan terimakasih untuk ide-idenya.
8. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2012 Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, Allahumma Aamiin. Akhirnya hanya keapda Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan

Wassalammu'alaikum warrahmatullahiwabarrakatu

Padang, 29 Januari 2019

Penulis

Nada Kamilia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis.....	12
1. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan.....	12
2. Implementasi program.....	16
3. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.....	21
4. Teori Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Program atau Kebijakan.....	28
B. Kerangka Konseptual.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Informan Penelitian.....	37
D. Jenis, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	44
B. Temuan Khusus.....	48
C. Pembahasan.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Nama-nama calon penerima bantuan RTLH di Kelurahan Aie Pacah ...	6
Tabel 2	Daftar Informan Penelitian	37
Tabel 3	Nama barang material bantuan RTLH di Kelurahan Aie Pacah.....	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual	34
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	46
Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Kelurahan Aie Pacah	47

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	82
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	85
Lampiran 3 Surat Tugas Dosen Pembimbing	91
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	92
Lampiran 5 Peraturan WaliKota Padang No. 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat dimana dia tinggal dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi manusia kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Namun tidak semua manusia mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut. Contohnya saja kebutuhan papan, masih banyak masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Padang yang belum memiliki rumah layak huni. Dilihat dari fungsinya, rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung diri dari berbagai ancaman keamanan tetapi juga sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh karena itu kondisi rumah dan fasilitas tempat tinggal akan mempengaruhi derajat kesehatan penduduk. Dewasa ini kebutuhan akan rumah yang layak huni semakin meningkat, namun tidak seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat ekonomi lemah yang mengharuskan mereka hidup dalam rumah yang tidak layak huni. Kemiskinan membuat masyarakat miskin tidak mampu memenuhi salah satu kebutuhan dasar berupa rumah layak huni. Kebutuhan juga merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi oleh setiap manusia.

Dalam konteks penyelenggaraan perumahan yang tersentralisasi, saat ini belum tersedia sistem penyediaan perumahan di daerah yang tanggap terhadap perkembangan kebutuhan. Hal ini merupakan urusan publik selain urusan individu. (Bappenas, 2013:455). Selaras dengan hal itu, Iwan (2004 : 163) juga mengemukakan bahwa salah satu permasalahan bidang perumahan

dan permukiman di Indonesia adalah rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena ketidak mampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta lemahnya sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat miskin, baik melalui mekanisme pasar formal maupun informal. Maka peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang tepat sasaran untuk berfungsinya sistem perumahan yang terjangkau harus dijalankan, bahkan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, pemerintah harus menyediakan subsidi. Ini adalah konsekuensi bila negara mengakui bahwa perumahan adalah sebuah kebutuhan dasar. (Santoso, 2002 : 59).

Menurut Undang-Undang No. 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman, perumahan merupakan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan, sarana, prasarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan kawasan permukiman diartikan sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Disamping itu, perumahan dan kawasan permukiman dapat diartikan sebagai kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan, dan perbaikan, pencegahan, dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat.

Selanjutnya, kondisi rumah tinggal menjadi salah satu indikator kemiskinan. Luas bangunan berbanding dengan jumlah penghuni rumah, kelayakan kualitas bahan bangunan rumah dan kepemilikan fasilitas MCK merupakan kriteria yang menempati urutan teratas. Dengan kata lain kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Berbagai upaya dan program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan dengan anggaran yang berasal dari berbagai sumber, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Padang juga terus berupaya mensejahterakan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam percepatan penurunan angka kemiskinan adalah dengan meluncurkan sebuah program yang terintegrasi dan terpadu yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bantuan rumah tidak layak huni dianggap berdampak positif memutus salah satu rantai kemiskinan efeknya terasa seketika itu juga. Perkembangan Kota Padang di berbagai sektor pembangunan membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat seperti munculnya berbagai perumahan-perumahan mewah yang berada di sekitar permukiman sederhana masyarakat Kota Padang dan pada akhirnya kesenjangan sosial makin terasa.

Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat merupakan salah satu langkah Pemerintah Kota Padang untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya melalui program bantuan merehab 1.000 rumah tidak layak huni per tahun atau dikenal dengan program bedah rumah bagi warga miskin yang menjadi salah satu program unggulan walikota Padang. Program bedah rumah bagi warga miskin ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati/mempunyai rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan tujuan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin, serta memberikan dorongan kepada masyarakat yang mampu agar mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.

Pelaksanaan program yang dilakukan ini berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, seperti Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja (Disosnaker), Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan (TRTBP) juga dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang, *Cooperation Social Responsibility* (CSR) swasta, kemudian aparat Kecamatan, Kelurahan serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kota Padang mengarahkan program bedah rumah tidak layak huni ini kepada daerah-daerah yang memang membutuhkan penyediaan rumah layak huni. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan rumah layak huni adalah adanya ketebatasan mereka dalam menyediakan rumah yang layak sebagai tempat berteduh sekaligus tempat pembinaan keluarga dan penghasilan keluarga yang kecil sebagian besar terserap untuk kebutuhan sehari-hari yang sifatnya mendesak seperti makan, minum,

pendidikan serta kesehatan. Selain itu karena besarnya penghasilan yang terserap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut menyebabkan tidak ada lagi dana yang tersisa bagi pembangunan perumahan mereka. Tingginya harga lahan dan bahan pembangunan menyebabkan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah tidak mampu menyediakan rumah bagi keluarga mereka sendiri secara swadaya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komperhensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman.

Kelurahan Aie Pacah terdiri dari 10 rukun warga (RW) dan 40 rukun tetangga (RT) dengan jumlah kepala keluarga 729 (KK) yang berdasarkan data dari Pemuktakiran Bantuan Data Terpadu (PBDT). Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin di Kelurahan Aie Pacah adalah terbatasnya akses perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman. Masalah program bantuan rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh untuk tahun 2017 dari kelurahan Aie Pacah, ada 7 (tujuh) orang bakal calon penerima bantuan RTLH yang diajukan tetapi hanya beberapa orang nama yang mendapatkan bantuan RTLH ini.

Tabel 1.2
Nama-Nama Calon Penerima Bantuan RTLH di Kelurahan Aia Pacah
Tahun 2017

No	Nama	Kelurahan	Anggaran
1	Mulyadi	Aie Pacah	—
2	Firdamon	Aie Pacah	—
3	Roslaini	Aie Pacah	—
4	Rusli	Aie Pacah	—
5	Irma Suryani	Aie Pacah	—
6	Leni Marzalena	Aie Pacah	—
7	Elviyeni	Aie Pacah	—

(Sumber : dokumentasi penelitian 11 Oktober 2017)

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat program-program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Program-program yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berfokus kepada bantuan stimulan usaha ekonomi produktif seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), ataupun berbentuk bantuan tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Raskin. Namun pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskinpun tidak luput dari perhatian pemerintah, sehingga pada tahun 2014 pemerintah melalui Kementerian Sosial RI membuat program rehab rumah tidak layak huni. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut maka dibentuklah Peraturan Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kementrian Sosial RI. Penanggulangan kemiskinan

perkotaan melalui rehabilitas sosial rumah tidak layak huni. Sumber dana dari program ini bersumber dari Kementerian Sosial yang berasal dari APBN, hibah dalam negeri, APBD dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Dalam berita online Metro Padang (<http://metropadang.com/berita>, diakses pada 4 Desember 2016), menjelaskan bahwa program perbaikan rumah tidak layak huni ini dilaksanakan di Kota Padang sejak tahun 2014. Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang dibantu dari Kementerian Sosial dan APBD Kota Padang sudah berhasil merealisasikan rehab 386 unit rumah dengan total anggaran Rp. 3,36 miliar, termasuk swadya masyarakat 580 juta. Pada tahun 2015 telah membangun 410 unit rumah dengan total anggaran Rp. 5,97 miliar, termasuk swadya masyarakat Rp. 1,685 miliar.

Demi mengatasi permasalahan kemiskinan maka pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakis Miskin di Implementasikan pada pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang No. 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, mulai dari kepala keluarga, mekanisme pengajuan bantuan, dan mekanisme pencairan bantuan yang mana melibatkan komponen-komponen sumber daya perumahan dan permukiman secara luas dan integratif.

Seperti contohnya pada salah satu tempat di Kota Padang yaitu kawasan Maransi. Kawasan Maransi adalah sebuah kawasan di Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah dengan wilayahnya masih bernuansa perdesaan yang

rumahnya sangat sederhana bahkan cukup memprihatinkan. Kawasan Maransi ini menjadi salah satu kawasan yang mendapatkan bantuan rehab dan bedah rumah tidak layak huni. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan salah satu warga yaitu Ibuk Yurnalis, 40 tahun beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaannya, masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan dari program rehab dan bedah rumah tidak layak huni sebesar Rp. 7,5 juta per rumah sesuai kebutuhan, itu pun tidak berupa uang hanya berupa bahan material bangunan seperti kayu, semen, tanah, batu dan lainnya yang diberikan secara bertahap, sementara itu untuk pembangunannya sendiri pengerjaannya diserahkan kepada masyarakat. Padahal mereka tidak mempunyai dana untuk membangun dan masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut merasa terbebani jika dana pembangunan diserahkan kepada masyarakat sehingga bahan material yang diberikan mubazir terletak dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selayaknya dan bantuan tersebut menjadi sia-sia”. (Wawancara, 23 Januari 2016).

Pemerintah Kota Padang menganggarkan dana program bantuan RTLH dalam pelaksanaannya berupa bentuk barang atau bahan material bangunan yang mana bahan bangunan untuk kebutuhan rumah dibuat didalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan biaya bantuan tersebut bersumber dari APBD Kota Padang dengan rincian biaya sebesar Rp. 10.000.000 sampai Rp.15.000.000 setiap unit rumah. Tetapi berdasarkan wawancara diatas dana yang dianggarkan pemerintah tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

Berkaitan dengan masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian serta pengamatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam hal ini penulis mengangkat sebuah judul penelitian tentang “Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Oleh Dinas Sosial Di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota padang”.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Dana yang dianggarkan Pemerintah Kota Padang dalam program tersebut tidak sesuai dengan dana yang diberikan kepada masyarakat.
- b. Pemberian dana yang diberikan Pemerintah Kota Padang yang secara bertahap dirasakan kurang efektif bagi masyarakat.
- c. Bantuan yang diberikan hanya berupa bahan material, sementara untuk dana pembangunan pengerjaannya dibebankan kepada masyarakat.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah lebih terfokus dari penelitian ini, maka penelitian ini di batasi pada “Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Oleh Dinas Sosial Di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”.

3. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, untuk lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, penulis mencoba memutuskan permasalahan yang akan dibahas nantinya dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam program bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam memaksimalkan pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dari program bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam memaksimalkan pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap teori-teori dan metode dalam kajian administrasi negara

pada umumnya dan kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, teori pembangunan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, selain itu sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima dibangku kuliah, serta dapat membandingkan antara teori dengan praktek yang akan terjadi di lapangan.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi kalangan akademis dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Padang.